



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN SINGKAT

**KOMISI VIII DPR RI (BIDANG AGAMA, SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEBENCANAAN)**

Tahun Sidang	: 2025-2026
Masa Persidangan	: III
Rapat Ke	: 11
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Dengan	: Ketua Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, Tanggal	: Rabu, 4 Februari 2026
Waktu	: Pukul 13.00 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI Gedung Nusantara II Lantai 2 Jl. Jenderal Gatot Subroto – Jakarta 10270
Acara	: 1. Pelaksanaan Program Kerja dan Anggaran Tahun 2026 2. Isu-isu Aktual
Ketua Rapat	: H. Singgih Januratomoko, S.K.H., M.M.
Sekretaris Rapat	: Mc. Zaqki Zachariaz Thamrin
Hadir	: 1. 22 dari 42 Anggota Komisi VIII DPR RI; 2. 3 Anggota Komisi VIII DPR RI Izin; 3. Ketua Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji beserta Jajaran.

I. PENDAHULUAN:

1. Ketua Rapat membuka Rapat Komisi VIII DPR RI pada pukul 13.45 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, H. Singgih Januratomoko, S.K.H., M.M., dengan didampingi Ketua Komisi VIII DPR RI, H. Marwan Dasopang, M.Si., dan Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI H. Abdul Wachid dan H. Ansory Siregar sesuai waktu dan tempat acara tersebut di atas.

II. KESIMPULAN RAPAT

Pada Rapat Dengar Pendapat Komisi VIII DPR RI dengan Ketua Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dengan agenda **Pelaksanaan Program Kerja dan Anggaran Tahun 2026 serta Isu-Isu Aktual**, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Komisi VIII DPR RI mendesak Dewan Pengawas BPKH untuk melakukan telaah yang komprehensif terhadap Rencana Strategis (Renstra) BPKH tahun 2022-2027 dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) BPKH tahun 2026 sesuai dengan kondisi sosial, ekonomi, politik, dan keagamaan mutakhir serta menyampaikan hasilnya kepada Komisi VIII DPR RI.
2. Komisi VIII DPR RI mendesak Dewan Pengawas BPKH agar memastikan rekomendasi hasil pengawasan menyeluruh baik sudah maupun belum ditindaklanjuti oleh Badan Pelaksana BPKH untuk dilaporkan kepada Komisi VIII DPR RI.
3. Komisi VIII DPR RI mendesak Dewan Pengawas BPKH agar menyampaikan jawaban tertulis atas pendapat dan pertanyaan dari Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI terkait dengan RKAT BPKH tahun 2026 paling lambat tanggal 9 Februari 2026.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 15.40 WIB.

**PIMPINAN KOMISI VIII DPR RI
WAKIL KETUA,**

TTD

H. SINGGIH JANURATMOKO, S.K.H., M.M.